Bab 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji adalah salah satu dari rukun Islam yang ke-5, yang diwajibkan atas semua orang muslim yang mampu, satu kali seumur hidupnya. Lebih dari sekali hukumnya menjadi sunnah.[1] Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

. . .وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ

Atrinya: ". . .Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia karena Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang ingkar (terhadap kewajiban haji), maka bahwasannya Allah maha kaya dari semesta alam. (Q.S. Ali Imron: 97).[2]

Haji menjadi manifestasi pengorbanan yang paling nyata wujudnya selain kurban. Ritual-ritual dan tempat-tempat dalam ibadah haji melambangkan banyak hal yang berhubungan dengan perjalanan rohani manusia. Setiap manusia dalam kehidupannya merasakan kehausan spiritual tertentu yang secara psikologis memberi rasa aman, baik itu dari kejenuhan hidup maupun ketidak pastian masa depannya.[3] Dengan menjalankan ibadah haji manusia mempunyai harapan bisa mendekatkan diri kepada Allah serta dimudahkan dalam menjalani hidup didunia dan akhirat.

---

[1] Sufi Suwandari, 2002, *Haji Mistik; Sepertinya Tiada Haji Mabrur di Indonesia*, Intemedia dan Nalar, Bekasi, hal. 85.
[2] Departemen Agama RI, 2002, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT. Sari Agung, Jakarta, hal. 113
[3] Ikhwan dan Abdul Halim, 2002, *Ensiklopedia Haji dan Umrah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. VII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap tahun sebagian masyarakat Indonesia ada yang menjalankan ibadah haji. Pada tahun 2015 jemaah haji Indonesia yang berangkat berjumlah 155.200 kuota haji reguler dan 13.600 kuota haji khusus,[4] dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia haus akan ibadah kepada Allah. Sedangkan jemaah haji yang berangkat melalui Embarkasi Surabaya Jawa Timur yang meliputi kabupaten dan kota seluruh Jawa Timur serta ditambah Provinsi Bali, Provinsi NTT dan Provinsi lainnya berjumlah 28.169 jemaah.[5] dari semua jemaah haji tahun 2015 tersebut petugas PPIH embarkasi Surabaya berjumlah 223 orang. Dengan rasio 100 jemaah dilayani 1 petugas PPIH.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Implementasinya bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya. Melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntutan Agama. Serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.[6]

---

[4] http://news.liputan6.com/read/2273762/menag-kuota-haji-2015-indonesia-bakal-kembali-normal. Diakses pada tanggal 24-Mei-2016.

[5] Hasil Dokumentasi Laporan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Surabaya tahun 1436H/2015M. hal. 5.

[6] Henny Aristiana S, 2005. *"Proses Pemberangkatan Jama'ah Haji di Asrama Haji Sukolilo Surabaya (Studi Analisis Tentang Fungsi Actuating di Asrama Haji Sukolilo Surabaya)"*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yakni lembaga yang mempunyai tugas dalam hal keagamaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 ditetapkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.[7] Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang keagamaan.[8]

Kementerian Agama wilayah Jawa Timur dibagi menjadi beberapa bagian yakni, bidang PHU, bidang URAIS, bidang PENAIS, bidang PAIS, bidang PD PONTREN dan bidang PENDMA. Bagian tersebut yang mengurusi lingkup agama Islam. Dalam lingkup agama lain juga ada diantaranya bidang Kristen, bidang Hindu, bidang Budha dan bidang Katolik. Dengan adanya bidang-bidang tersebut memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan yang ada dalam agama dengan secara teratur.

Bidang PHU Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengelola urusan haji dan umroh dalam lingkup wilayah Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Juanda Sidoarjo No 26. Bidang PHU didalamnya dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya, seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji, seksi pembinaan haji dan umroh, seksi akomodasi, transportasi dan perlengkapan haji, seksi pengelolaan keuangan haji dan seksi sistem informasi haji.[9] Dari semua bagian

[7] Hasil Dokumentasi Renstra tahun 2015-2019, Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, hal. 4.
[8] Profil Kementerian Agama http://www.kemenag.go.id. Diakses pada tanggal 06 Januari 2016.
[9] Hasil Dokumentasi Ruang PHU Kementerian Agama pada tanggal 04 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tugas masing-masing yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisai. Dalam urusan haji khususnya bidang PHU membentuk sub organisasi yakni Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang mengurusi segala hal tentang haji yang dimulai dari pemberangkatan sampai kepulangan jemaah haji. Dalam menjalankan tugas PPIH Provinsi Jawa Timur bertempat di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pembagian tugas PPIH ada beberapa bagian yakni Pengumpulan dan Pengolahan Data (PULAHTA), Tata usaha, keuangan, humas dan penerangan.[10]

Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan haji bidang penyelenggara haji dan umroh PHU mempunyai visi memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Jemaah haji yang sudah mendaftarkan diri akan mendapatkan porsi keberangkatan haji dalam satu tahun sebelum keberangkatan diberikan manasik haji sebanyak delapan kali pertemuan, hal tersebut diberikan agar jemaah mengerti akan semua rangkaian kegiatan haji. Dalam manasik tersebut jemaah diberikan pengertian akan tata cara melaksanakan haji, rukun haji, wajib haji dan apa saja yang dilarang dalam menjalankan ibadah haji. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan jemaah haji mendapatkan ridho dari Allah dan menjadi haji yang mabrur.

Selain kegiatan manasik yang diberikan Kementerian Agama kabupaten/kota, jemaah juga diberikan pembekalan dan diasramakan selama 24 jam. Pembekalan tersebut bertujuan untuk pemantapan manasik yang telah diberikan di masing-masing kabupaten/kota. Selain pemantapan manasik juga diberikan arahan-arahan dan himbauan ketika berada di Arab Saudi. Dalam

[10] Hasil Dokumentasi Laporan Penyelenggaraan Haji Tahun 2015 Kementerian Agama pada tanggal 13 Juni 2016. hal. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembekalan tersebut jemaah haji juga diberikan uang saku/*living cost* yang berasal dari uang yang telah dibayarkan pada Bank penerima setoran haji.

Kegiatan yang paling padat petugas PPIH Surabaya yakni, pada pemberangkatan dan kepulangan jemaah haji. Dari kegiatan pemberangkatan petugas PPIH disibukkan dalam pengecekan data jemaah yang berangkat, jemaah yang sakit, pembagian gelang identitas dan pembagian paspor. Selain itu ada pembagian untuk jasa angkut koper jemaah. Tidak berhenti sampai disitu kegiatan pemberangkatan haji, akan tetapi petugas PPIH harus mengawal sampai jemaah haji terbang ke Arab Saudi dan memastikan jemaah berangkat sesuai dengan data.

Pada saat kegiatan kepulangan petugas PPIH disibukkan dengan pengecekan kesehatan jemaah, pengecekan paspor, pengecekan petugas haji yang mendampingi setiap kloter dan pengecekan data keberangkatan dan kepulangan. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan petugas PPIH pada saat kepulangan memang berbeda dengan saat keberangkatan. Pada kepulangan harus lebih teliti karena jemaah yang berangkat terkadang ada yang tertinggal karena sakit ataupun meninggal di Arab Saudi. Petugas PPIH pada saat kepulangan bertanggung jawab sampai dengan mengantarkan jemaah ke kabupaten/kota masing-masing.

Kegiatan petugas PPIH yang banyak tersebut membutuhkan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan yang baik. hal tersebut penting dilakukan karena perencanaan memiliki beberapa tahap yakni, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan dan mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan pencapaian tujuan.[11]

Perencanaan dalam suatu organisasi penting dilakukan karena kegiatan suatu organisasi akan tertata dan mudah untuk dikendalikan. Selain itu perencanaan penting karena perencanaan akan memberi efek baik pada pelaksanaan maupun pengawasan. Suatu perencanaan merupakan langkah pertama dalam usaha mencapai suatu kegiatan.[12]

perencanaan dan pelaksanaan yang seimbang akan memberikan kemudahan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. dengan harapan perencanaan yang telah diterapkan bisa terlaksana dengan baik. Pelaksanaan dianggap penting karena perencanaan tanpa adanya pelaksanaan tidak akan bisa berjalan dengan sempurna. Pengarahan atau pelaksanaan dapat diberikan batasan sebagai suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk dan instruksi kepada bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.[13]

Dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti masalah perencanaan dan pelaksanaan yang ada di PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ketertarikan penulis meneliti masalah tersebut didasarkan pada (1) Mayoritas warga Negara Indonesia muslim (2) Haji adalah kegiatan yang mempunyai dimensi internasional (3) Banyak calon jemaah haji yang belum pernah melaksanakannya. Hal tersebut dikuatkan dalam penelitian Henny Aristiana S.[14]

---

[11] T. Hani Handoko, 2009, *Manajemen*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 78-80.
[12] A.W. Widjaya, 1987, *perencanaan sebagai fungsi manajemen*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 33
[13] Bedjo Siswanto, 1990, *Manajemen Modern konsep dan aplikasi*, Sinar Baru, Bandung, hal. 121.
[14] Henny Aristiana S, 2005. *"Proses Pemberangkatan Jamaah Haji di Asrama Haji Sukolilo Surabaya: (studi analisis tentang fungsi actuating di asrama haji sukolilo surabaya)"*, Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil dokumentasi menyebutkan bahwa para jemaah calon haji yang dilayani 92% belum pernah melaksanakan haji. Dari situlah penulis sangat antusias dalam melakukan penelitian tersebut. Penelitian yang berbasis manajemen tersebut sangat luas, sehingga penulis membatasi penelitiannya sebatas pada sistem perencanaan dan pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis diatas, maka rumusan masalah dapat diambil sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perencanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana sistem pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan sistem perencanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
2. Untuk menggambarkan sistem pelaksanaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang besar dalam telaah organisasi maupun perusahaan. Penulis melihat bahwa pembahasan perencanaan dan pelaksanaan, dalam konteks organisasi, seolah-olah hanya menjadi hak organisasi besar saja. Padahal perencanaan dan pelaksanaan itu hal paling mendasar dalam menjalankan roda suatu organisasi. Penelitian ini didesain agar para pengelola organisasi bisa memperoleh gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan sekaligus memperoleh bekal teoritis untuk meng-*update* dan meng-*upgrade* sistem perencanaan dan pelaksanaan organisasinya.

Oleh karenanya, penelitian ini amat penting untuk dilakukan karena bisa memberikan beberapa manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Bagi Penulis

      Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu manajemen yang berbasis kelembagaan Islam dan khususnya yang berkaitan dengan sistem perencanaan dan pelaksanaannya serta penerapannya secara nyata di lapangan.

   b. Bagi Prodi

      Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat menambah jaringan kerjasama dibidang penelitian dan menambah referensi bagi prodi Manajemen Dakwah. Serta memberikan gambaran atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan harapan menambah khazanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilmuan yang modern dan bisa memberikan yang terbaik bagi prodi dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Manfaat Praktis
   a. Memberikan informasi kepada PPIH tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan untuk memperbaiki sistem yang ada selama ini
   b. Menambah wawasan bagi para praktisi manajemen pada umumnya, tentang pentingnya sistem perencanaan dan pelaksanaan dalam suatu organisasi
   c. Sebagai bahan masukan kepada Pimpinan PPIH kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan PPIH yang baik
   d. Sebagai bahan masukan kepada semua PPIH di Indonesia khususnya Embarkasi Surabaya

E. Definisi Konsep

Menurut Koentjoningrat yang dikutip Nanik Trisnawati Konsep atau pengertian, merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala yang menjadi pokok perhatian.[15]

Agar tidak terjadi kerancauan dalam pemahaman makna tentang sistem perencanaan dan pelaksanaan, peneiti akan memberikan gambaran dari teori yang ada hubungannya dengan judul penelitian, diantaranya:

[15] Koentjoningrat. 1994. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Gramedia pustaka umum. Jakarta. hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang menyeluruh dan terorganisasikan, terdiri dari dua tahun lebih bagian (komponen, subsistem) yang dipisahkan oleh batas yang dapat diidentifikasikan dari suprasistem lingkungan *(environmental suprasystem)* yang lebih luas. Dengan demikian, sistem itu meliputi spectrum yang sangat luas, baik alam kebendaan, alam biologi, maupun alam kemasyarakatan.[16] Sedangkan menurut L. ACKOF yaitu, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.[17]

a. Ciri-ciri sistem

Untuk mengetahui sesuatu itu sistem atau bukan, antara lain dapat dilihat dari ciri-cirinya. Ada beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk mengetahui ciri-ciri sistem ini yang ada pada dasarnya satu sama lainnya yang melengkapi. Pada umumnya ciri-ciri sistem itu antara lain: [18]

1) Sistem itu bersifat terbuka
2) Suatu sistem terdiri dari dua atau lebih subsistem
3) Suatu sistem mempunyai kemampuan untuk dengan sendirinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya *(self-adjustment)*
4) Sistem itu juga mempunyai kemampuan untuk mengatur diri sendiri *(self-regulation)*
5) Sistem itu mempunyai tujuan atau sasaran.

---

[16] Napa J. Awat, S.U, 1989, *Manajemen Strategi (Suatu Pendekatan Sistem)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 1.
[17] M. Faisal, 2008, *Sistem Informasi Manajemen Jaringan*, UIN-MALANG PRESS, Malang, hal. 14.
[18] Tatang M Amirin, 1996, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perencanaan

Secara *definitive*, Stoner dan Wankel memperkenalkan istilah perencanaan strategis *(strategic planning)* sebagai proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan, dan penetapan metode yang dibutuhkan untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang.[19]

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna.[20] Sedangkan menurut Mary Robins dalam M Munir yakni, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran dan tujuan organisasi, menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan mengembangkan *hierarki* rencana secara *komprehensif* untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.[21] Rencana yang baik hendaknya diarahkan kepada tujuan *(goal oriented).* Rencana secara jelas mengemukakan: [22]

---

[19] Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2012, *Manajemen Syariah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 79.
[20] T. Hani Handoko, 2009, *Manajemen*, BPFE-yogyakarta, Yogyakarta, hal. 78.
[21] M. Munir dan Wahyu Ilaihi, 2006, *Manajemen Dakwah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 96.
[22] A.W Widjaja, 1987, *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hal. 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Apa yang akan dicapai, berkenaan dengan penentuan tujuan
b. Mengapa hal itu perlu dilakukan, berkenaan dengan alasan atau motif perlunya kegiatan itu
c. Bagaimana akan dilaksanakan, berkenaan dengan prosedur kerja, sasaran dan biaya
d. Bilamana akan dilaksanakan, berkenaan dengan penjadwalan kegiatan kerja atau pelaksanaan kegiatan, pentahapan kegiatan sampai dengan selesai
e. Siapa yang akan melaksanakan, berkenaan dengan orang-orang yang turut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan
f. Mengadakan penilaian, berkenaan dengan kegiatan, mana yang telah selesai, sedang dan akan diselesaikan
g. Kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dan kegiatan mengadakan penyesuaian dan perubahan rencana

Perencanaan perlu ada dalam suatu organisasi karena dengan adanya perencanaan sasaran dan tujuan organisasi sudah ditentukan. Setiap langkah organisasi sudah terpetakan dan akan berjalan sesuai koridor perencanaan. Begitu juga dengan PPIH yang berorientasi dalam urusan haji, penting adanya perencanaan yang baik agar setiap langkah yang dilakukan memberikan manfaat yang besar dan dapat meminimalisir kesalahan.

3. Pelaksanaan *(actuating)*

Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka manajer mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan-tindakan diantaranya *leadership* (memimpin), perintah, komunikasi, dan *conseling* (nasehat).[23]

Dari pengertian diatas jelas kiranya bahwa *actuating* adalah proses untuk menggerakkan sebuah organisasi guna untuk menjalankan suatu fungsi manajemen yang paling utama yakni perencanaan. Dengan seorang pemimpin dalam sebuah organisasi bisa mengarahkan terus-menerus hingga meminimalisir suatu kegagalan. Fungsi manajemen ini juga penting adanya, karena suatu perencanaan akan mustahil bisa dilakukan jika tidak ada pelaksanaannya atau kegiatan secara nyata.

Peace dan Robinson Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan *(actuating)* merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak fungsi manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.[24]

Pelaksanaan *(actuating)* dalam suatu organisasi mempunyai peran yang sentral karena berhubungan dengan proses yang ada di lapangan. Seperti banyak di utarakan para ahli di atas pelaksanaan juga berkaitan dengan

---

[23] Joseph L. Massil, 1987, *Dasar-Dasar Manajemen*, Erlangga, Jakarta, hal. 46.

[24] Nanik Trisnawati, 2010. "*Sistem Perencanaan dan Pelaksanaan Toko Busana Muslim Ifadah Surabaya*", Skripsi, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, hal. 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan fisik. Dari hal tersebut bagaimana seorang pemimpin bisa mengarahkan bawahan hingga memenuhi target yang telah ditentukan. Dalam kaitanya PPIH yang kegiatanya juga meliputi banyak hal diantaranya menyiapkan data jemaah, bongkar muat koper dll. Pelaksanaan yang baik akan membantu perencanaan yang ada, karena semua kegiatan saling berkaitan.

4. Ibadah Haji

Dari pendeskripsian rangkaian ibadah haji PPIH Embarkasi Surabaya yakni, mulai dari pendaftaran jemaah haji ke Bank penerima setoran tabungan haji dan mengurus ke Kementerian Agama masing-masing kabupaten atau kota. Dari rangkaian itu jemaah haji menunggu porsi keberangkatan yang telah ditentukan. Sebelum jemaah haji berangkat menjalankan ibadah ada manasik haji yang diberikan oleh KUA sebanyak 6 kali pertemuan dan kabupaten sebanyak 2 kali pertemuan yang diberikan secara gratis.[25] Jemaah haji berangkat dari kabupaten/kota masing-masing ke Asrama Haji Surabaya menggunakan transportasi yang sudah disiapkan. Setelah sampai di Asrama Haji jemaah di asramakan selama 24 jam, di waktu tersebut di berikan pemantapan manasik haji kepada jemaah dan kegiatan lain seperti, pemeriksaan tas, penyiapan akomodasi, pengecekan dokumen, pemberian uang saku/*living coast* dan pengecekan kesehatan. Setelah rangkaian tersebut selesai jemaah haji berangkat menuju Bandara Juanda untuk terbang ke Arab Saudi

[25] Hasil Wawancara dengan Drs. H.M. Na'im, M.Ag Selaku Wakil Sekretaris 1 PPIH tanggal 24 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yakni lembaga Negara yang berbasis *non-profit*. Dalam urgensinya Kementerian Agama berorientasi dalam urusan agama yang ada di Indonesia. Dalam sistem kerjanya Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi beberapa bidang diantaranya, bidang PHU, bidang URAIS, bidang PENAIS, bidang PAIS, bidang PD PONTREN dan bidang PENDMA. Bagian tersebut yang mengurusi lingkup agama Islam. Dalam lingkup agama lain juga ada diantaranya bidang Kristen, bidang Hindu, bidang Budha dan bidang Katolik.[26]

6. PPIH Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya tahun 1436/2015M berdasarkan keputusan Direktur Jenderal penyelenggara haji dan umroh nomor D/368/2015 tanggal 6 juli 2015, dan dilantik pada tanggal 3 agustus 2015 di Asrama Haji Surabaya berjumlah 23 orang, yang berasal dari berbagai unsur, yaitu dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, Kantor Imigrasi, Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai type Madya Pabean Juanda, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Surabaya, Polisi Daerah Jawa timur, UPT Asrama Haji Surabaya, Kantor Otoritas Bandara Juanda dan Angkasa Pura 1 Bandara Juanda.[27]

---

[26] Hasil observasi secara langsung di Kantor Bidang PHU pada tanggal 24 Mei 2016.

[27] Hasil Dokumentasi Laporan Pelaksanaan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Surabaya Tahun 1436H/2015M. hal. 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yang akan dijelaskan secara rinci oleh peneliti, diantarannya:

Bab I : Pendahuluan meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Teoritik meliputi, penelitian terdahulu yang relevan dan berkaitan dengan konsep-konsep yang diambil dari permasalahan yang diangkat. Yang meliputi tentang pengertian sistem perencanaan dan pelaksanaan serta penjelasan perspektif islam.

Bab III : Metodologi Penelitian yang meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian meliputi, gambaran umum mengenai obyek penelitian, penyajian data yang memaparkan fakta atas permasalahan yang diangkat serta analisis data secara nyata atas masalah yang diangkat.

Bab V : Penutup meliputi, kesimpulan dari pembahasan, saran dan rekomendasi dari permasalahan yang diangkat untuk pihak yang di jadikan obyek penelitian khususnya dan untuk pihak lain yang bergerak dibidangnya serta keterbatasan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id